

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MELAYU

Amat Budiman

PPs UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Widayaiswara Ahli Muda BPSDM Provinsi Riau
ahmad.budiman78@yahoo.com

Abstract

Anti-corruption education is a cultural process to make human life better and more meaningful with conscious and planned effort to realize the teaching and learning process which is critical to anti corruption value. In the perspective of Malay culture, the values of anti-corruption education are derived from the guidance or purpose of Malay people's life, namely the Tunjuk Ajar Melayu from pantun, ungkapan, Gurindam Twelve and others. All Malay cultural values can be promoted to prevent and reduce corruption in society and government.

Keywords: *Anti-Corruption Education, Malay Culture*

Abstrak

Pendidikan anti korupsi merupakan proses pembudayaan untuk menjadikan hidup manusia lebih baik dan bermakna dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam perspektif budaya Melayu, nilai-nilai pendidikan anti korupsi diambil dari petunjuk atau pedoman kehidupan masyarakat Melayu yaitu Tunjuk Ajar Melayu berupa pantun, ungkapan, Gurindam Dua Belas dan lain-lain. Semua nilai-nilai budaya Melayu dapat dikembangkan untuk mencegah dan mengurangi perilaku korupsi dalam masyarakat dan pemerintahan.

Kata kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Budaya Melayu

PENDAHULUAN

Persoalan korupsi sudah tidak asing lagi bagi kita. Kata korupsi yang sering kita baca dan dengar di media massa serta sering menghiasi layar kaca televisi. Pelaku korupsi berasal dari rakyat yang telah memiliki jabatan dan dipercaya masyarakat di pemerintahan. Korupsi di negeri ini telah menjadi suatu kebiasaan, bahkan bisa dikatakan sudah menjamur hingga sulit untuk dihilangkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani korupsi. Namun, tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakan tersebut. Salah satu upaya jangka panjang

yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Selain itu, generasi muda juga sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Melalui penerapan pendidikan anti korupsi diharapkan bisa lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh budaya korupsi dari generasi pendahulunya.

Dalam kehidupan manusia, budaya berperan sebagai konsep abstrak yang mempengaruhi apa yang dianggap penting dan tidak oleh manusia sehingga dapat menjadi indikator dari perilaku hidup manusia itu sendiri. Akan tetapi perilaku

atau sikap individu sejatinya bukanlah bagian dari kebudayaan karena ia melekat pada diri individu itu sendiri sebagai bagian dari masyarakat. Dalam masyarakat Melayu Riau terdapat nilai-nilai anti korupsi telah berkembang dalam tradisi budaya masyarakat Melayu Riau, yaitu berupa Tunjuk Ajar Melayu seperti pantun, syair, gurindam, hikayat, dongeng serta petatah petitih. Nilai-nilai yang terkandung dalam Tunjuk Ajar Melayu dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam menanamkan pendidikan anti korupsi kepada penerus bangsa.

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Definisi Pendidikan

John Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Bratanata dkk. mengartikan pendidikan sebagai usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya untuk mencapai kedewasaannya (Ahmadi dan Uhbiyati 2007: 69). Sedangkan Menurut Brown (dalam Ahmadi, 2004: 74) bahwa pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar dimana perubahan-perubahan didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri orang itu melalui didalam kelompok.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain.

Hakikat Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin yaitu *Corrumpere*, *Corruptio*, atau *Corruptus*. Secara harfiah kata korupsi berarti penyimpangan dari kesucian (*Profanity*), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok. Korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Korupsi merupakan penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi (Kumorotomo, 1992 : 175). Menurut Adhyta Satya (2014: 5) dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain pengertian di atas, terdapat pula istilah-istilah yang lebih merujuk kepada modus operandi tindakan korupsi, yaitu:

1. Penyogokan (*graft*), merujuk kepada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain.
2. Pemerasan (*extortion*), yang diartikan sebagai permintaan setengah memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara.
3. Penggelapan (*fraud*), menunjuk kepada tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan diri sendiri sehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi lebih mahal.
4. Penyipuan, merupakan memberikan sesuatu sebagai suap tidak harus berupa uang, tapi bisa berupa barang berharga, rujukan hak-hak istimewa, keuntungan ataupun janji tindakan, suara atau pengaruh seseorang dalam sebuah jabatan publik.
5. Penggelembungan, kegiatan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara suka rela.
6. Nepotisme (*nepotism*), memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan, bukan karena kemauannya.

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Di mana norma soisal, norma hukum maupun norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.

Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri.

- a. Sifat tamak/rakus manusia. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus, sudah berkecukupan, tapi serakah. Mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
 - b. Moral yang kurang kuat. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
 - c. Gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
 - d. Aspek Sosial, perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.
2. Faktor eksternal, pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.
 - a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.
 - b. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang

kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

- c. Aspek politis, menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertindak laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.
- d. Aspek organisasi, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi.

Korupsi sangat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Adapun dampak korupsi yang terlihat secara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan harga-harga barang akibat anggaran APBN yang dikorupsi

2. Bertambahnya rakyat miskin dikarenakan uang tunjangan bagi rakyat miskin yang seharusnya disalurkan dikorupsi.
3. Mahalnya biaya yang harus rakyat keluarkan untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang seharusnya bersubsidi.
4. Kesenjangan pendapatan semakin tinggi.
5. Banyaknya rakyat yang di PHK akibat perusahaan kecil tempat mereka kerja gulung tikar akibat dana investasinya dikorupsi.

Hakikat Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Pendidikan anti korupsi memiliki dasar pemikiran, yaitu:

1. Realitas dan praktek korupsi di Indonesia sudah sangat akut, maka masalah tidak bisa diselesaikan hanya melalui penegakan hukum.
2. Menurut Paulo Freire, pendidikan mesti menjadi jalan menuju pembebasan permanen agar manusia menjadi sadar (disadarkan) tentang penindasan yang menimpanya, dan perlu melakukan aksi-aksi budaya yang membebaskannya.
3. Perlawanan masyarakat terhadap korupsi masih sangat rendah jalur penyelenggaraan Pendidikan Anti korupsi selama ini tidak ada.

Latar belakang adanya pendidikan anti korupsi yaitu:

- a. Praktek korupsi di Indonesia telah terjadi sejak masa kerajaan di wilayah nusantara, bahkan telah tersistematisasi

- mulai pada masa VOC dan pemerintahan Hindia Belanda
- b. Secara faktual persoalan korupsi di Indonesia, dikatakan telah sampai pada titik kulminasi yang akut tidak hanya mewabah di kultur dan struktur birokrasi pemerintah juga menjadi fenomena multi dimensional telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan sosial dan kultural
 - c. Pergeseran pola hidup masyarakat yang tadinya menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual mulai bergeser pada nilai-nilai materialistis dan konsumerisme.
 - d. Korupsi yaitu *extra ordinary crime*, Upaya menjadikan musuh bersama/*common enemy* belum menjadi bagian dari gerakan moral bangsa Karena itu pemberantasan korupsi harus dijadikan sebagai *collective ethics movement*.

Nilai-nilai anti korupsi ada sembilan, yaitu :

- 1) Kejujuran, yaitu sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur memiliki makna satunya kata dan perbuatan. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial.
- 2) Kepedulian, adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang didalamnya.
- 3) Kemandirian, merupakan suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.
- 4) Kedisiplinan, ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal.
- 5) Tanggung Jawab, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apa-pun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.
- 6) Kerja Keras, didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian keberanian, ketabahan, keteguhan dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.
- 7) Kesederhanaan Gaya Hidup, merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.
- 8) Keberanian, dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya.
- 9) Keadilan, yaitu penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban.

Sedangkan prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu :

Akuntabilitas, adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik: 2005). Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Transparansi, transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya transparansi dibagi menjadi lima, yaitu: a. Proses penganggaran, b. Proses penyusunan kegiatan, c. Proses pembahasan, d. Proses pengawasan, dan e. Proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat *bottom up*, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan

pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.

Kewajaran, *fairness* atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari lima hal penting komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran dan informatif.

Kebijakan, berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan.

KontrolKebijakan, merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi.

Berbagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi, yaitu dengan:

Pembentukan Lembaga Anti Korupsi, yaitu dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh di negara kita sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pencegahan Korupsi di Sektor Publik. Salah satu cara untuk mencegah

korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.

Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hak ini dapat meningkatkan keinginan pemerintah untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara transparan. Pemerintah memiliki kewajiban melakukan sosialisasi atau diseminasi berbagai kebijakan yang dibuat dan akan dijalankan.

Pencegahan dengan memasukan pendidikan anti korupsi di sekolah/ perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi bagi siswa mengarah pada pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Suseno (dalam Djabbar, 2009) berpendapat bahwa pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah pendidikan yang membuat orang merasa malu apabila tergoda untuk melakukan korupsi, dan marah bila ia menyaksikannya. Menurut Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi. Ketiga sikap moral fundamental tersebut adalah kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab.

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pendidikan adalah suatu usaha untuk memanusiakan manusia, sedangkan kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang

dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain.

Pendidikan merupakan proses pembudayaan untuk menjadikan hidup manusia lebih baik dan bermakna, sementara itu manusia akan menghasilkan kebudayaan yang baik jika ditopang oleh pendidikan yang luas. Pendidikan pada pelaksanaannya harus mengacu pada akar budaya bangsa kita. Suatu bangsa akan kehilangan karakter dan identitasnya jika memisahkan nilai-nilai budaya dalam pendidikannya, baik secara teori maupun praktis. Transfer nilai-nilai budaya yang dimiliki paling efektif adalah melalui proses pendidikan. Dari sudut pandang individu pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi individu, sebaliknya dari sudut pandang kemasyarakatan pendidikan adalah sebagai pewarisan nilai-nilai budaya. Dalam pandangan ini, pendidikan mengemban dua tugas utama, yaitu peningkatan potensi individu dan pelestarian nilai-nilai budaya. Manusia sebagai makhluk berbudaya, pada hakikatnya adalah pencipta budaya itu sendiri. Budaya itu kemudian meningkatkan sejalan dengan peningkatan potensi manusia pencipta budaya itu. Pendidikan dan kebudayaan sangat erat sekali hubungannya karena keduanya saling berkesinambungan, keduanya saling mendukung satu sama lain.

KARAKTERISTIK ORANG MELAYU

Melayu merupakan satu etnis yang memiliki keidentikan dengan Islam. Identitas Islam yang melekat pada etnis Melayu tidak bisa terlepas dari spektrum historis.

Menurut Syamsul Nizar (Riau Pos) ada beberapa identitas masyarakat Melayu yang melekat pada etnis ini, antara lain:

Pertama, bagi etnis Melayu, Islam merupakan ruh yang memberikan daya dorong dan warna bagi seluruh dimensi adat dan kehidupan masyarakatnya. Untuk itu,

tak heran bila seluruh substansi dan simbol Melayu terangkum dengan mendasarkannya atas ajaran dan dasar Islam. Bahkan, rangkaian tatanan pemerintahan dan munculnya perlawanan masyarakat Melayu terhadap penjajah lebih dominan disemangati oleh ajaran Islam sebagai power yang memberikan motivasi gerakan.

Kedua, Melayu identik dengan keramah-tamahan, baik dengan sesamanya maupun lingkungannya. Keramahtamahan masyarakat Melayu dapat terlihat dari sikap dan prilaku sehari-hari yang bisa berinteraksi dengan etnis dan bangsa manapun. Melayu sangat menghargai perbedaan dan tak pernah memandang rendah bangsa lain. Sebab, ruh yang menyemangatnya adalah ajaran Islam.

Ketiga, secara umum geografis masyarakat Melayu lebih dominan hidup di pesisir pantai. Kondisi ini membangun karakter masyarakat Melayu bersikap inklusif (terbuka). Inklusivitas masyarakat Melayu dengan dunia luar telah diakui dalam sejarah nusantara, baik ketika mereka berinteraksi dengan para pedagang Arab, Cina maupun Gujarat.

Keempat, Melayu memiliki harga diri yang tinggi, meskipun dalam ketiadaan. Ada selentingan yang cenderung negatif terhadap Melayu, khususnya di Riau. Selentingan negatif tersebut mengungkapkan bahwa Melayu Pemalas. Persoalan malas hampir dimiliki oleh etnis yang berada pada wilayah geografis yang makmur. Mereka bukannya malas, akan tetapi kemakmuran negeri mereka membuat mereka tidak perlu mengurus tenaga ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kelima, Melayu senantiasa menjunjung tinggi agama, nilai budaya, persahabatan, dan pendidikan. Hal ini dapat terlihat secara jelas sikap raja-raja Melayu yang memiliki apresiasi demikian tinggi dalam melaksanakan ajaran agamanya, memiliki kesetiaan dan tak mengenal sikap menikam dari belakang, dan peduli dengan pendidikan (khususnya agama) bagi keturunannya.

Keenam, masyarakat Melayu mengedepan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Betapa besar atau kecilnya masalah selalu diputuskan secara musyawarah. Yang besar didengarkan pendapatnya dan yang kecil dihargai pendapatnya. Egaliter yang diterapkan masyarakat Melayu perlu diteruskan oleh generasi hari ini.

Dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau terdapat sebuah petunjuk atau pedoman dalam menjalankan kehidupan, yaitu Tunjuk Ajar Melayu. Tunjuk Ajar Melayu adalah ungkapan-ungkapan bijak yang dikemas dalam pantun atau syair, juga bisa berupa gurindam atau hikayat, berisi petuah, pengajaran atau nasihat orang tua kepada anak secara turun-temurun atau dari orang tua-tua kepada generasi muda, dari generasi ke generasi dalam masyarakat Melayu. Tunjuk Ajar yang dimaksud adalah segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti luas yang membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi Allah. Tunjuk Ajar membawa berkah yang menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.

Terdapat jenis-jenis Tunjuk Ajar Melayu yaitu pantun, syair, gurindam dan hikayat. Bagi orang Melayu Tunjuk Ajar ditempatkan pada kedudukan yang penting, bahkan sebagian orang tua-tua menempatkannya teramat penting karena Tunjuk Ajar mengandung isi yang luhur yang bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Beberapa manfaat dari Tunjuk Ajar yaitu sebagai pedoman dalam bertingkah laku, sebagai pedoman dalam bertutur kata, menjadikan kita memiliki rasa kekeluargaan di dalam kehidupan bermasyarakat, menjadikan kehidupan bermasyarakat tenteram dan damai karena berbudi pekerti luhur, menjadikan kehidupan bermasyarakat menjadi terasa sangat menyenangkan karena saling menghargai satu sama lain, dan menjadikan kehidupan bermasyarakat aman dan sejahtera.

Untuk mewujudkan manusia yang bertuah, berbudi luhur, cerdas, dan tarpuji, orang Melayu mewariskan Tunjuk Ajar melalui ungkapan lisan maupun contoh teladan. Pewarisan melalui sastra lisan seperti pantun, syair, cerita rakyat, ungkapan, pepatah, petitih, bidal, dan perumpamaan. Sedangkan pewarisan melalui contoh teladan misalnya dengan memberikan contoh perilaku, perangai, dan perbuatan terpuji.

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MELAYU

Budaya Melayu menuntun segala aspek kehidupan orang Melayu, baik jasmani maupun rohani. Segala tindak tanduk baik sikap, perasaan dan fikiran orang Melayu tentang segala peristiwa yang berlangsung di sekitarnya, terlihat, terdengar, dialami selau dinilai menurut pandangan orang tua-tua dalam bahasa kiasan, terdiri dari mantra, persamaan, perumpamaan, ibarat, bidal, tamsil, sindiran dan lambang. Kesemuanya itu terdapat dalam Tunjuk Ajar Melayu, yaitu pantun, ungkapan, Gurindam Dua Belas, dan lain-lain. Di zaman sekarang pun masih ditemukan orang-orang tua menasehati anak-anaknya menggunakan yamsil, ibarat, perumpamaan dan sindiran. Walau lambat laun nasehat itu hilang ditelan masa.

Apa yang diungkapkan dan disampaikan tidak ada yang bermakna kosong, semuanya memiliki arti tersendiri yang walaupun pada masanya akan lebih mudah untuk dimengerti apa maksudnya, akan tetapi sastra tersebut tak lapuk tergerus zaman. Seperti sikap kesatna yang dalam membela kebenaran serta hak dan kewajiban yang tercermin dan berbagai ungkapan Melayu, (T.A Ridwan, 1986: 46-52).

*jangan takut tanah akan merah, esa
hilang dua terbilang
sebelum ajal berpantang mati, asal di
atas kebenaran*

*biar putus dipancung, setapakpun
berpantang mundur*

Terdapat ungkapan-ungkapan yang pada hakekatnya menunjukkan bagaimana kebudayaan masyarakat Melayu. Bahasa menunjukkan bangsa, begitu kata pepatah menyebutkan. Ungkapan Melayu tersebut mengandung nilai pendidikan anti korupsi yaitu:

*yang salah tegur menegur, yang
rendah angkat mengangkat
yang tinggi junjung menjunjung yang
lupa diingatkan
yang bengkok diluruskan, yang tidur
dijagakan*

Dengan adanya ungkapan dalam budi bahasa yang baik, akan memberikan identifikasi atau pertanda orang yang baik, demikian pula sebaliknya sehingga bahasa dapat mencerminkan tingkah laku seseorang. Bahasa sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari tentu melekat erat kepada kehidupan manusia itu sendiri sehingga mempengaruhi budayanya, perilaku dan keyakinannya. Demikian pula sebaliknya, budaya juga akan membentuk karakter dan kebiasaan manusia.

Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua Belas yaitu Gurindam kedelapan mengingatkan diri manusia tentang komitmen dirinya sebagai individu yang harus bertanggungjawab terhadap segala perbuatan dan tingkah lakunya sendiri.

*barang siapa khianat akan dirinya
apa lagi kepada yang lainnya
kepada dirinya ia aniaya
orang itu jangan engkau percaya*

Merujuk kepada empat baris yang diungkapkan Raja Ali Haji, setidaknya ada dua objek yang ditekankannya terkait dengan sikap anti korupsi. *Pertama*, terhadap diri sendiri. Seseorang diingatkannya untuk tidak berperilaku khianat, karena bila kepada dirinya saja ia mampu untuk mengkhianatinya tentu akan

dianggap tidak mengapa bila berkhianat kepada orang lain. Yaitu pekerjaannya yang berpotensi membuat kecurangan. *Kedua*, adalah kepada orang lain. Mereka yang tabiat perilakunya aniaya pada dirinya sendiri, maka orang tersebut tidak layak untuk dipercaya, untuk dijadikan sebagai sahabat, apa lagi dijadikan sebagai Pemimpin. Menyelewengkan kepercayaan, mengkhianati amanah, dan memanipulasi kekuasaan adalah bentuk perilaku korup yang subur mekar dalam kehidupan berbangsa saat ini.

Para koruptor pada hakekatnya adalah orang yang berhutang. Hutang yang ada haruslah dibayar, dan memiliki kewajiban untuk melunasi hutang tersebut, tidak meninggalkan pada ahli waris. Dalam pantun tua ada berisikan nasehat kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dengan diri agar tidak mendapat masalah kelak di kemudian hari.

*patah lancang kita sadaikan,
supaya sampan tidak melintang
petuah orang kita sampaikan,
supaya badan tidak berhutang*

Maksud dari pantun diatas yaitu ditujukan kepada mereka (pejabat, pemimpin negeri) yang mendapatkan titipan, pesan, dan amanah agar menyampaikan, memberikan, atau menghantarkannya kepada mereka yang berhak (masyarakat). Bila tidak dilakukan, maka ini sama saja artinya dengan berkhianat. Mereka yang telah diberikan amanah untuk berkuasa, memimpin, menjalankan tugas negara, amanah dari masyarakat, maka pekerjaan, amanah, petuah yang telah diberikan kepada mereka yang mau mengembannya haruslah dilaksanakan dengan sepenuh hati. Bila tidak hati-hati, bila ada yang tidak tersampaikan, ada yang hilang atau ada yang diambil tanpa haknya, tentu akan menanggung akibatnya sendiri.

Orang Melayu selalu mengutamakan martabat, harga diri dan keberkahan yang terkandung di dalamnya, bukan berapa besar jumlahnya. Harta yang dengan

merampas hak orang lain tentu tidak akan memberikan berkah serta akan mendatangkan malapetaka tidak hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat. Oleh karena itu kesederhanaan dan kewajaran dalam penampilan dan kehidupan tanpa melampaui norma utama yang berlaku dianggap sebagai cara untuk menjaga tatanan dan pergaulan sosial. Kuncinya diarahkan kepada kejujuran yang merupakan penampilan terhadap harga diri yang utama manusia. Apa lagi *sekali lancung keujian, seumur hidup orang tidak akan percaya*. Orang yang berperilaku serakah merupakan tipe orang yang suka menjadikan korupsi sebagai ‘amalan’ hidupnya. Sangat berpantang bagi masyarakat Melayu untuk hidup serakah, apa lagi harus merampas hak-hak orang lain dengan cara tidak terhormat.

Pandangan Raja Ali Haji tentang etika politik yaitu *segala yang khianat akan segala raja-raja dapat tiada datang jua ke atas mereka itu murka Allah ta'ala fadhihat, hubayahubaya. Hai segala hamba jangan kamu berbuat khianat kepada raja-raja, tak dapat tiada pekerjaan yang demikian itu dinyatakan Allah ta'ala juga kepadanya*. Mereka yang berkhianat ini akan terkena hukum di dunia dan di akhirat. Kepada mereka yang menjadi raja (pemimpin) hendaklah bersikap adil, bijaksana, jujur dan menjalankan amanah.

SIMPULAN

Korupsi merupakan perilaku yang di pengaruhi oleh budaya, sehingga korupsi dapat diminimalisir dengan pendekatan budaya yaitu dengan memberikan pendidikan nilai-nilai anti korupsi yang berkembang dalam tradisi masyarakat Melayu. Budaya Melayu tersebut yaitu petunjuk atau pedoman berupa Tunjuk Ajar Melayu, yang dikemas dalam pantun atau syair, gurindam atau hikayat, berisi petuah, pengajaran atau nasihat orang tua kepada anak secara turun-temurun. Meningkatnya perilaku korupsi terjadi bukan karena adanya budaya Melayu yang berkembang, akan tetapi terjadi karena masyarakat telah

meninggalkan budaya tersebut, sehingga seperti memberi dukungan terhadap korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Tenas. 1989. *Pandangan Orang Melayu Terhadap Anak*. Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika.

<http://www.riapos.co/1124-opini-identitas-melayu.html#.Wd1zRHYxXIU#ixzz4v9u1txvj>

https://karyatulisilmiah.com/nilai-nilai-dan-prinsip-anti-korupsi/?upm_export=pdf

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2003. *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.

Satya Widyananda, Adhyta. 2014. *Peran Pendidikan Anti Korupsi Dini Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Korupsi*. Makalah. Tidak diterbitkan. Malang. Univesrsitas Negeri Malang.

T.A Ridwan. 1986. *Bahasa Melayu Riau (Suatu Tinjauan Sosiolinguistik), dalam masyarakat Melayu Riau dan Kebudayaannya*, Budi Santoso (Peny.) Pekanbaru: Pemprov. Riau.